

## **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN DINAS KOPERASI UMKM DAN TENAGA KERJA KOTA PALU DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI**

**Rachmad<sup>1</sup>, Chesya Alexandra<sup>2</sup>, Astrid. A.Z. Maraila<sup>3</sup>, Natasya<sup>4</sup>, Sahwa<sup>5</sup>**

[rachmadmhad8@gmail.com](mailto:rachmadmhad8@gmail.com)<sup>1</sup>, [chesyaalexandra@gmail.com](mailto:chesyaalexandra@gmail.com)<sup>2</sup>, [astridmaraila55@gmail.com](mailto:astridmaraila55@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[natasyaaaaaa31@gmail.com](mailto:natasyaaaaaa31@gmail.com)<sup>4</sup>, [w68935450@gmail.com](mailto:w68935450@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Tadulako**

### **ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan dan berkepanjangan terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palu. Penurunan pendapatan, melemahnya daya beli masyarakat, keterbatasan modal usaha, serta perubahan pola konsumsi menjadi tantangan utama yang masih dirasakan pelaku UMKM meskipun pandemi telah mereda. Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, khususnya melalui Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dinas dalam mendukung pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi, mengkaji dampak program bantuan yang diberikan, serta mengidentifikasi kendala dan harapan pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM dan pihak dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal dan peralatan usaha memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan dan pemulihan usaha bagi sebagian pelaku UMKM. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan dalam aspek pemerataan, ketepatan sasaran, dan transparansi penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan serta peningkatan responsivitas dan komunikasi pemerintah daerah agar program pemulihan ekonomi UMKM dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** UMKM, Pemulihan Ekonomi, Peran Pemerintah Daerah, Pandemi COVID-19, Kota Palu.

### **ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic has caused significant and prolonged impacts on the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Palu City. Declining income, reduced purchasing power, limited business capital, and changes in consumption patterns remain major challenges even after the pandemic subsided. In this context, the role of local government becomes crucial, particularly through the Office of Cooperatives, MSMEs, and Manpower of Palu City, which is responsible for MSME development and empowerment. This study aims to analyze the role of the office in supporting MSMEs' economic recovery after the pandemic, examine the impact of assistance programs, and identify challenges and expectations of MSME actors toward local government policies. This research employs a qualitative descriptive approach using in-depth interviews with MSME actors and government officials. The findings indicate that capital and equipment assistance positively contributed to business continuity and recovery for some MSMEs. However, issues related to equity, targeting accuracy, and transparency in assistance distribution remain. Therefore, policy evaluation and improved institutional responsiveness are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of MSME recovery programs.*

**Keywords:** Msmes, Economic Recovery, Local Government Role, COVID-19 Pandemic, Palu City.

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, termasuk di Kota Palu. Dalam struktur perekonomian daerah, UMKM tidak hanya menjadi sumber utama

pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, serta menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi lokal. Karakteristik UMKM yang relatif fleksibel, padat karya, dan mudah beradaptasi menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian daerah, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada keberlangsungan sektor ini.

Namun demikian, pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang sangat besar terhadap keberlangsungan UMKM. Pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan mobilitas, serta melemahnya daya beli konsumen selama masa pandemi menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami penurunan omzet secara drastis. Tidak sedikit pelaku usaha yang kehilangan pelanggan tetap, menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal operasional, hingga terpaksa mengurangi jam operasional atau menghentikan sementara kegiatan usahanya. Kondisi tersebut mencerminkan kerentanan UMKM terhadap guncangan ekonomi, terutama ketika terjadi krisis yang berdampak langsung pada permintaan pasar dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Dampak pandemi tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan kemampuan sebagian pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengarah pada pemanfaatan platform digital menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi secara cepat. Namun, keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta sarana pendukung menyebabkan tidak semua pelaku UMKM mampu mengikuti perubahan tersebut, sehingga daya saing usaha menjadi semakin lemah.

Meskipun pandemi COVID-19 secara resmi telah mereda, dampak ekonomi yang ditinggalkannya tidak serta-merta hilang. Pelaku UMKM di Kota Palu hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang menghambat proses pemulihan usaha. Menurunnya daya beli masyarakat pasca pandemi membuat tingkat penjualan belum kembali stabil, sementara keterbatasan akses permodalan masih menjadi kendala utama bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kembali skala usahanya. Akibatnya, proses pemulihan ekonomi UMKM berlangsung secara lambat dan tidak merata di antara pelaku usaha, di mana sebagian mampu bertahan dan bangkit, sementara sebagian lainnya masih berada dalam kondisi rentan.

Dalam situasi tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai aktor utama dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM. Secara teoritis, pemerintah memiliki fungsi alokatif, distributif, dan stabilisasi dalam perekonomian, sehingga intervensi kebijakan menjadi instrumen penting untuk mengoreksi ketimpangan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil melalui berbagai bentuk intervensi, seperti pemberian bantuan modal, pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta fasilitasi pemasaran dan akses perizinan.

Di Kota Palu, peran tersebut dijalankan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yang bertugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan dan bangkit dari dampak krisis ekonomi akibat pandemi. Program bantuan dan pendampingan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat ketahanan ekonomi pelaku UMKM, serta mendorong adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital.

Namun demikian, efektivitas program-program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku

UMKM. Tidak semua pelaku usaha merasakan manfaat yang sama dari program bantuan dan pendampingan yang diberikan. Sebagian pelaku UMKM menyatakan bahwa bantuan yang diterima cukup membantu dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, sementara sebagian lainnya mengungkapkan belum memperoleh bantuan atau menilai bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan. Perbedaan pengalaman tersebut mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam aspek pemerataan, ketepatan sasaran, serta responsivitas kebijakan pemerintah daerah terhadap kondisi riil pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam peran Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam mendukung pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini berfokus pada pengalaman nyata pelaku UMKM di lapangan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai dampak program pemerintah, kendala yang masih dihadapi, serta harapan pelaku usaha terhadap kebijakan pemulihan ekonomi ke depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung penguatan sektor UMKM di Kota Palu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan pihak Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar informan dapat menyampaikan pengalaman, persepsi, dan harapan mereka secara bebas dan mendalam. Data yang diperoleh kemudian ditranskripsikan dan dianalisis secara deskriptif-tematik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih mengalami berbagai kesulitan dalam memulihkan kondisi usahanya setelah pandemi COVID-19. Meskipun aktivitas ekonomi secara umum telah kembali berjalan, kondisi usaha pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Penurunan pendapatan masih dirasakan oleh sebagian besar pelaku usaha, terutama akibat menurunnya daya beli masyarakat dan kurangnya jumlah pelanggan. Selain itu, keterbatasan modal usaha menjadi kendala utama yang menghambat pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, maupun melakukan inovasi produk. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengarah pada transaksi berbasis digital juga menjadi tantangan tersendiri, karena tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan dan sarana yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, khususnya dalam bentuk bantuan modal usaha, dinilai cukup membantu oleh sebagian pelaku UMKM. Bantuan modal tersebut memberikan dukungan awal bagi pelaku usaha untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, memenuhi kebutuhan operasional dasar, serta kembali menjalankan aktivitas usaha yang sempat terhenti atau mengalami penurunan. Selain berdampak pada aspek finansial, bantuan yang diberikan juga memberikan dampak psikologis berupa meningkatnya kepercayaan diri dan motivasi pelaku UMKM untuk kembali berusaha dan bangkit dari keterpurukan akibat

pandemi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua pelaku UMKM memperoleh akses yang sama terhadap program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan proposal atau permohonan bantuan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari pihak terkait. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi adanya ketidakterbukaan informasi serta ketidakpastian dalam proses penyaluran bantuan. Selain itu, terdapat pula pelaku UMKM yang menilai bahwa bantuan yang diterima kurang sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan, baik dari segi jenis bantuan maupun besaran bantuan yang diberikan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek ketepatan sasaran dan pemerataan program bantuan UMKM. Ketidaksesuaian antara program bantuan dan kebutuhan riil pelaku usaha berpotensi mengurangi efektivitas program pemulihan ekonomi yang telah dirancang. Lebih lanjut, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah daerah sebagai pihak yang diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme perencanaan, penyaluran, dan pengawasan program bantuan UMKM agar pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran, merata, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

## KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palu, baik dari sisi penurunan pendapatan, keterbatasan modal, maupun perubahan pola konsumsi masyarakat. Meskipun situasi pandemi secara formal telah berakhir, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memulihkan dan menstabilkan kembali kondisi usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi UMKM tidak dapat berlangsung secara instan, melainkan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dan terarah dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, peran Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu terbukti memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi pelaku UMKM. Melalui berbagai program bantuan dan pendampingan, dinas berupaya membantu pelaku usaha untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong pelaku UMKM agar mampu bangkit dari dampak krisis ekonomi akibat pandemi. Program bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk modal usaha, peralatan, maupun pendampingan, memberikan kontribusi nyata bagi sebagian pelaku UMKM dalam memperbaiki kondisi usaha dan menumbuhkan kembali kepercayaan diri untuk berwirausaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program pemulihan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan aspek pemerataan bantuan, ketepatan sasaran penerima program, serta transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Tidak meratanya akses terhadap program bantuan dan adanya ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan riil pelaku UMKM berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan yang telah dirancang. Selain itu, kurangnya kejelasan informasi dan responsivitas dalam menindaklanjuti pengajuan bantuan turut memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi kebijakan secara menyeluruh serta peningkatan responsivitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan

program pemulihan UMKM. Evaluasi tersebut perlu difokuskan pada perbaikan mekanisme penyaluran bantuan, peningkatan transparansi, serta pemetaan kebutuhan pelaku UMKM secara lebih akurat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program pemulihan UMKM yang dijalankan dapat berlangsung secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat ketahanan UMKM dan mendorong pemulihan ekonomi daerah Kota Palu secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Sulawesi Tengah. (2020, June 27). Palu City Government reports 60 percent decline in MSME turnover due to COVID-19. Antara News. <https://sulteng.antaranews.com/berita/133398/pemkot-palu-sebut-60-persen-omset-umkm-anjlok-akibat-covid-19>
- Badan Pusat Statistik Kota Palu. (2022). Palu City in figures 2022. BPS Kota Palu.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Analysis of the impact of COVID-19 on business actors in Indonesia. BPS Republic of Indonesia. <https://www.bps.go.id>
- Gani, A., Anam, H., & Yohan. (2023). The impact of COVID-19 on MSME income in the Urban Forest area of Palu City (Undergraduate thesis, Universitas Tadulako). Universitas Tadulako Repository. <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/107545>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). The role of MSMEs in national economic recovery. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). MSME recovery strategies after the COVID-19 pandemic. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia. <https://kemenkopukm.go.id>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Community empowerment in the perspective of public policy. Alfabeta.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1991). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rafiq, M. (2020). The role of the Office of Cooperatives, MSMEs, and Manpower of Palu City in developing micro, small, and medium enterprises. IAIN Palu Repository. <http://repository.iainpalu.ac.id/1217/>
- Safitri, D., Asrifai, & Rusdin, R. B. (2024). The role of the Palu City Government in empowering MSMEs. Journal of Government Innovation Studies, 1(1), 137–153. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jjis/article/view/1549>
- Santi, I. N. (2022). Social media utilization as a marketing strategy for MSMEs in Palu City during the COVID-19 pandemic. SOLMA: Journal of Community Service and Empowerment, 11(3), 423–431. <https://doi.org/10.22236/solma.v11i3.9230>
- Sugiyono. (2019). Qualitative, quantitative, and R&D research methods. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Winarno, B. (2014). Public policy: Theory, process, and case studies. CAPS.